

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

- A.M. Hendropriyono, 2009. *Terorisme*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Abdul Aziz Hakim, 2015. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*,: Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Anis Widyawati, 2014 “Kajian Hukum Internasional Terhadap HAM”, *Jurnal Pandecta*, Fakultas Hukum UNNES, Semarang
- Bagir Manan, 2006. *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Penerbit P. T. Alumni, Jakarta
- Frans Hendra Winarta. 2011. *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*. PT. Alex Media Komputindo. Jakarta
- Hamid Basyaib, 2006, *Membela Kebebasan*, Freedom Institute. Jakarta
- Hasibuan, Albert. 2008 “Politik Hak Asasi Manusia (HAM) dan UUD 1945”. *LawReview Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*.
- John Stuart Mill (1806–1873), 2009. menjelaskan pentingnya kebebasan berbicara dan pers dengan cara yang agak berbeda di dalam karya klasiknya, *On Liberty*
- M. Muslimin, 2005. *Pentingnya Aspek Hukum dalam Menjalankan Profesi Jurnalistik Legality Jurnal Ilmiah Hukum*
- Nanan Sukarna. “Reformasi Kepolisian Negara RI: *Taking The Heart and Mind*”. Disampaikan pada Diskusi Publik ProPatria, Jakarta. 29 Januari 2008
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta
- Rizki Ariestandi Irmansyah, 2013. *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sadjijono, 2008. *Mengenal Hukum Kepolisian*. Laksbang Mediatama, Surabaya

Satjipto Rahardjo. 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*: Genta Publishing. Yogyakarta

Satya Arinanto dan Ifdhal Kasim, 2013. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta

Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Utomo, Warsito Hadi, 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka. Jakarta

Waluyo, Bambang, 2006. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

Zainuddin Ali, 2014. *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang pedoman Pengendalian Massa

C. INTERNET

Paskalis Marvin, 2014, Kebebasan Berpendapat melalui Media Sosial di Indonesia, [http : // www . academia . edu / 29486702 / Kebebasan_Berpendapat Melalui_Media_Sosial_di_Indonesia](http://www.academia.edu/29486702/Kebebasan_Berpendapat_Melalui_Media_Sosial_di_Indonesia), diakses pada 18 Juli 2019

O’Flaherty, Michael. “*Freedom of Expression : Article 19 of the Internasional Covenant on Civil and Political Rights and the Human Rights Committees General Comment*”. *Journal Human Rights*, No. 34, 627